

Audit Informasi Terhadap Layanan Repositori Institusi Perpustakaan DPR RI

Ridwan Faridan, Laksmi

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: ridwan.faridan31@ui.ac.id

Diajukan: 04-02-2025 Direvisi: 28-04-2025 Diterima: 15-05-2025

INTISARI

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi praktik audit informasi pada layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI. Praktik audit informasi tersebut menentukan kualitas layanan informasi repositori institusi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisa tematik untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh, mengidentifikasi pola dan menemukan tema umum masalah. Hasil menemukan bahwa prosedur kerja, instruksi dan pembagian tugas sudah digunakan oleh staf sehingga mempermudah kegiatan. Selain itu, seleksi koleksi informasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan informasi pemustaka dan program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Masalah yang ditemukan adalah penyebaran informasi secara langsung, kurangnya sosialisasi, terbatasnya jumlah koleksi, serta kendala teknologi basis data. Studi ini merekomendasikan bahwa perlu membuat kebijakan berupa prosedur dan instruksi kerja secara tertulis untuk penyebaran informasi secara langsung kepada pemustaka oleh staf, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan layanan repositori institusi, perlu meningkatkan jumlah koleksi repositori institusi melalui kebijakan penghimpunan koleksi dokumen atau terbitan DPR RI, serta perlu perbaikan dan pengembangan basis data repositori yang digunakan. Audit informasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan alur layanan informasi dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan layanan repositori institusi Perpustakaan DPR RI yang berkualitas.

Kata Kunci: Audit informasi; Repositori institusi; Layanan perpustakaan; Perpustakaan khusus; Evaluasi layanan

ABSTRACT

The purpose of the study was to identify information audit practices in institutional repository services at the DPR RI Library. The information audit practices determine the quality of institutional repository information services. The study used a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and document analysis. The data analysis technique used thematic analysis to analyze the qualitative data obtained, identify patterns and find common themes of the problem. The results found that work procedures, instructions and division of tasks had been used by staff to facilitate activities. In addition, the selection of information collections had been adjusted to the information needs of library users and the DPR RI national legislation program (Prolegnas). The problems found were direct dissemination of information, lack of socialization, limited number of collections, and constraints on database technology. This study recommends that policies be made in the form of written work procedures and instructions for direct dissemination of information to library users by staff, it is necessary to increase socialization activities to introduce institutional repository services, it is necessary to increase the number of institutional repository collections through policies for collecting document collections or DPR RI publications, and it is necessary to improve and develop the repository database used. Information audits can identify the strengths and weaknesses of information service flows and provide recommendations for improving the quality of the DPR RI Library's institutional repository services.

Keywords: Information audit; Institutional repository; library services; special libraries; service evaluation

PENDAHULUAN

Praktik audit informasi perlu dilakukan pada perpustakaan khusus di lembaga pemerintah atau swasta sebagai salah satu strategi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sumber daya, bertujuan sebagai alat evaluasi mengenai standar dan kebijakan yang digunakan saat ini dalam rangka meningkatkan layanan informasi yang berkualitas. Perpustakaan khusus ialah



suatu perpustakaan atau organisasi informasi yang berada di bawah naungan pemerintah ataupun swasta, yang memiliki tugas dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dengan koleksinya yang khusus sesuai dengan instansi tersebut (Maharani et al., 2024). Strategi Pengembangan perpustakaan merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas perpustakaan dalam bidang sumber daya manusia, sistem layanan, koleksi, dan fasilitas pendukung lainnya yang harus diperhatikan guna melakukan pengembangan perpustakaan agar dapat berkembang (Ridwan & Fajarini, 2023).

Penelitian-penelitian tentang audit informasi pada perpustakaan menunjukkan beberapa masalah mengenai pelaksanaan layanan dan tentang pemenuhan kebutuhan pemustaka, sumber daya informasi yang terbatas, atau masalah dalam penyampaian informasi dalam kegiatan layanan. Studi yang dilakukan oleh Qomariyah (2019) mengenai praktik audit informasi terhadap Sistem Informasi Perpustakaan ITS Surabaya (SPITS) menunjukkan masalah-masalah tentang kebutuhan informasi masih belum terpenuhi bagi pihak manajemen dan pemustaka, terdapat penyumbatan informasi yang terjadi dari pengguna perpustakaan ke pihak manajemen. Penelitian Fauziah (2020) menyatakan bahwa temuan dari hasil audit informasi dapat membantu meningkatkan kinerja staf dalam layanan dan menyediakan koleksi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan informasi di Perpustakaan Bank Pustaka. Hasil penelitian lainnya, Hariyah (2018), bahwa hasil audit informasi menunjukkan kurangnya sosialisasi dari hasil penelitian informasi keagamaan Litbang Kementerian Agama, dimana sosialisasi berguna untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan hasil temuan peneliti, dan analisisnya.

Kajian ini akan mengidentifikasi praktik audit informasi dilaksanakan pada layanan repositori institusi di perpustakaan khusus yaitu Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpustakaan DPR RI) sebagai unit informasi dari lembaga legislatif yang memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda. Praktik audit informasi akan mengevaluasi pemanfaatan sumber daya informasi, aliran informasi layanan, serta tantangan-tantangan khas yang dihadapi dalam mengelola layanan repositori institusi. *State of the art* tulisan ini mengenai kajian praktik audit informasi pada layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI sebagai perpustakaan khusus lembaga legislatif. Fokus pada penelitian ini adalah audit informasi yang dilakukan pada repositori institusi Perpustakaan DPR RI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi praktik audit informasi, mengevaluasi sumber daya informasi yang tersedia, mengevaluasi pemenuhan kebutuhan pemustaka, mengevaluasi aliran informasi pelaksanaan layanan, serta mengevaluasi masalah yang dihadapi pada layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI.

Audit informasi di perpustakaan bertujuan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap proses pengelolaan perpustakaan saat ini. Audit informasi sebagai alat evaluasi informasi serta kontrol kualitas dari informasi yang ada pada institusi yang diperlukan staf atau *stakeholder* dalam institusi (Henczel, 2001). Audit informasi dapat menetapkan atau meningkatkan proses manajemen informasi yang efektif dalam suatu organisasi dan diperlukan untuk menentukan nilai, risiko, fungsi, evaluasi, dan kegunaan aset informasi dalam organisasi (Ayinde & Omotayo, 2019). Kegiatan audit informasi melalui 7 tahapan: tahap merencanakan, tahap mengumpulkan data, tahap menganalisis data, tahap evaluasi, tahap komunikasi



rekomendasi, tahap implementasi rekomendasi dan tahap proses berkelanjutan (Henczel, 2001). Setiap tahap dibahas cara alternatif agar dapat diadaptasi sesuai dengan sumber daya fisik, keuangan, teknis dan sumber daya manusia yang tersedia.

Audit informasi mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan informasi yang saat ini disediakan, mengidentifikasi kesenjangan, inkonsistensi dan duplikasi. Proses audit informasi ini juga akan memfasilitasi pemetaan arus informasi di seluruh organisasi dan antara organisasi dan lingkungan eksternalnya untuk memungkinkan identifikasi hambatan dan inefisiensi lainnya (Henczel, 2001). Hal ini untuk memastikan bahwa alur proses benar-benar mengikuti pedoman standar yang ditentukan (Hashim et al., 2017). Aliran informasi yang baik memiliki ciri dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan tepat (tidak membingungkan), disajikan tepat waktu dan disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif (Westrum, 2014). Aliran informasi pada organisasi bertujuan supaya setiap anggota dalam organisasi dipastikan memiliki informasi. Melalui audit informasi akan memberikan arahan dan pedoman strategis bagi pengelolaan sumber daya informasi organisasi dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan informasi formal (Henczel, 2001).

Audit informasi menurut Henczel (2001) adalah proses evaluasi efektif lingkungan informasi saat ini, sebagai praktik organisasi melakukan penyelidikan sumber daya yang ada dan jasa layanan informasi yang sedang dilakukan. Sumber daya informasi dan jasa layanan informasi di perpustakaan saat ini terus berkembang dan tersedia berbentuk koleksi cetak maupun dalam koleksi digital. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2021 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Indonesia) menyebutkan perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan organisasi perangkat daerah, dan perpustakaan dewan perwakilan rakyat daerah untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan karya cetak maupun karya rekam yang dihasilkan untuk membangun repositori institusi. Tujuan repositori institusi untuk membuka akses hasil-hasil penelitian institusi dengan cara mengarsipkan sendiri, menyimpan serta melestarikan aset digital institusi lainnya (Hamim, 2019). Aset digital institusi dapat berupa literatur-literatur yang tidak diterbitkan atau yang berisiko hilang, contohnya laporan-laporan hasil penelitian, tesis dan skripsi. Disebutkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Indonesia), bahwa Perpustakaan Khusus dari Lembaga Pemerintah berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, pusat repositori lembaga, dan pusat sumber belajar di lingkungan lembaga induk.

METODE PENELITIAN

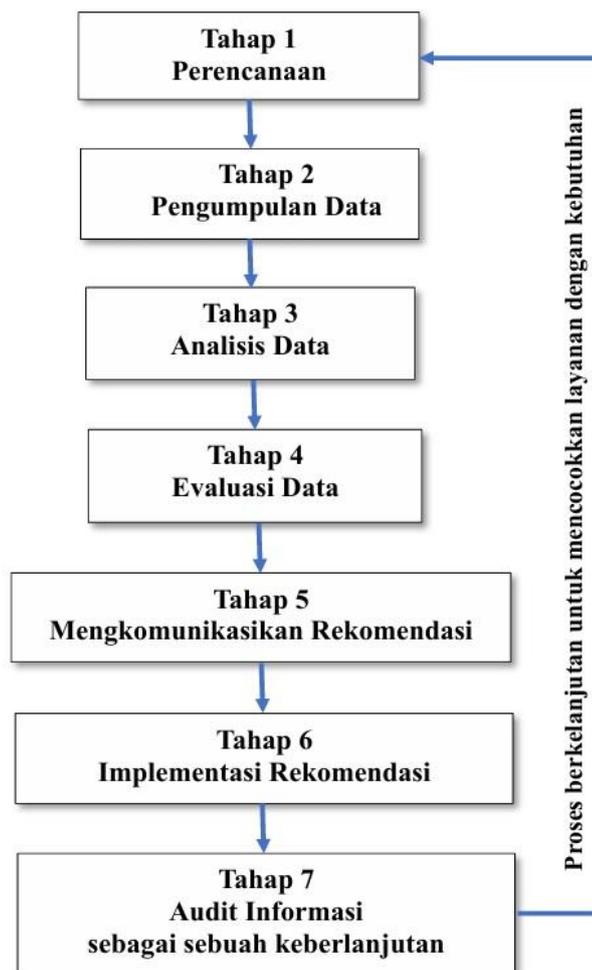
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan strategi kualitatif untuk mengkaji sebuah program, peristiwa, suatu aktivitas, proses ataupun tentang satu atau beberapa individu secara mendalam (Creswell, 2016). Objek kajian penelitian ini adalah layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI pada Januari-Februari 2025. Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia. Observasi dilaksanakan secara langsung ke lapangan mengenai kegiatan repositori institusi. Informan untuk wawancara ditentukan dengan



teknik *purposive sampling* terdiri dari pustakawan yang mengelola repositori institusi dan staf administrasi di perpustakaan. Jumlah informan adalah 14 orang terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan sebagai instruktur pelaksana, 1 orang koordinator pelaksana dan 12 orang pustakawan sebagai pelaksana lapangan pengelola repositori. Menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan pelaksanaan repositori institusi seperti seperti profil perpustakaan, struktur organisasi, visi, misi, dan pedoman pelayanan repositori institusi. Analisis penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa tematik (*thematic analysis*) yaitu menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Heriyanto, 2018).

PEMBAHASAN

Perpustakaan DPR RI sebagai perpustakaan khusus parlemen dalam lingkup kesekretariatan Setjen DPR RI memiliki fungsi sebagai unsur penunjang dalam membantu tugas dan wewenang DPR RI. Perpustakaan DPR RI mendirikan layanan repositori institusi sejak tahun 2017 yang menyediakan sumber informasi digital mengenai produk/terbitan DPR RI dan Setjen DPR RI dengan akses terbuka. Perpustakaan ini diharapkan menjadi layanan yang dapat menunjang dan mengakomodasi kebutuhan informasi anggota DPR RI, ahli dan pegawai di lingkungan DPR RI.



Sumber: Susan Henczel (2001)

Gambar 1. Model Pendekatan Tujuh Tahap Audit Informasi



Penelitian audit informasi pelayanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI ini menggunakan tujuh tahapan, (Gambar 1) yaitu: perencanaan, pengumpulan data, analisis data, evaluasi data, mengkomunikasikan rekomendasi, mengimplementasikan rekomendasi dan proses berkesinambungan (Henczel, 2001).

Perencanaan

Tahap perencanaan penting sebagai tahap awal, tentang merencanakan kegiatan audit, hal apa saja yang dikomunikasikan dan dukungan informasi yang dibutuhkan. Lima langkah proses perencanaan, yaitu: pertama, memahami tentang organisasi serta tujuan secara jelas; kedua, menetapkan ruang lingkup serta alokasi sumber daya; ketiga, pemilihan metodologi; keempat, mengembangkan strategi komunikasi; dan kelima, mendaftar dukungan dari manajemen.

Pada tahap perencanaan diawali dengan memahami tentang organisasi yang diaudit serta tujuannya secara jelas melalui pengkajian dokumen-dokumen terkait organisasi, seperti visi dan misi, fungsi dan tugas Perpustakaan DPR RI dan juga pengamatan langsung tentang pelaksanaan repositori institusi. Perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Perpustakaan DPR RI melalui Visi dan misi Perpustakaan DPR RI (Indonesia, 2019), tujuan adanya layanan repositori institusi adalah memberikan jasa layanan sebagai pendukung tugas dan fungsi DPR RI serta memenuhi kebutuhan ragam informasi yang disediakan secara cepat, tepat dan terbarukan untuk mendukung kegiatan DPR RI. Tujuan audit secara jelas adalah mengidentifikasi alur informasi pelayanan repositori institusi, mengevaluasi efektivitas informasi prosedur kerjanya, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi layanan repositori institusi. Menganalisis pemetaan arus informasi melalui struktur organisasi perlu diperhatikan. Menurut Henczel (2001) bahwa struktur organisasi sebagai bentuk secara formal koordinasi dan interaksi hasil desain manajemen bertujuan mengaitkan tugas-tugas individu dan kelompok dalam menggapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Perpustakaan DPR RI berada di bawah koordinasi Biro Protokol dan Humas pada Setjen DPR RI dan layanan repositori institusi dilaksanakan oleh 20 orang personil, yaitu 1 orang kepala biro menjadi penanggung jawab, 1 orang kepala perpustakaan sebagai instruktur pelaksana, 13 orang pustakawan sebagai staf pengelola dan 5 orang sebagai staf administrasi. Kegiatan layanan repositori institusi berupaya menyediakan dan menghimpun dokumen/terbitan mengenai DPR RI dari satuan kerja untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung program legislasi DPR RI yang bisa diakses secara cepat melalui *open access*, memberikan kemudahan dan tepat.

Ruang lingkup audit informasi yaitu layanan repositori institusi dan alokasi sumber daya yaitu berasal dari anggaran kegiatan perpustakaan. Sumber daya informasi antara lain berupa dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan repositori institusi seperti *standard operating procedure* (SOP), panduan atau instruksi kerja, berkas pemantauan dan berkas peminjaman. Alokasi sumber daya manusia ialah untuk perencanaan, pengelolaan, pengaturan, dan evaluasi pelaksanaan audit informasi. Dilakukan juga melalui sumber fisik pada proses layanan repositori institusi, melalui pencarian informasi tentang pelaksanaan teknisnya.

Audit informasi memilih metodologi mengumpulkan data dengan observasi langsung, mewawancarai informan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait. Metode untuk



menganalisis data berdasarkan data-data terkumpul mengenai alur informasi, kebutuhan informasi, efektivitas prosedur kerja dan informasi tersedia yang dipakai dan dibagikan kepada para staf pengelola repositori institusi. Berikutnya mengembangkan strategi komunikasi dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan pada kegiatan audit ini yaitu staf perpustakaan, peneliti dan staf ahli yang menggunakan perpustakaan serta pimpinan di unit-unit eselon 2 dan 3. Penting melakukan komunikasi yang efektif dengan *stakeholder* baik sebelum, sepanjang proses, dan mempertahankannya setelah audit, mereka perlu selalu mendapatkan informasi apa yang terjadi dan keterlibatan mereka dalam proses audit informasi (Henczel, 2001).

Langkah berikutnya yaitu mendaftar dukungan manajemen untuk mendapatkan bukti dukungan audit informasi pada layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI. Penelitian ini mendapat dukungan dari Kepala Biro Protokol dan Humas yaitu pimpinan eselon dua sebagai penanggung jawab kegiatan, Kepala Bagian Perpustakaan yaitu eselon tiga sebagai koordinator repositori institusi dan perwakilan dari staf pengelola yang memiliki jabatan tertinggi pustakawan.

Pengumpulan Data

Tahap mengumpulkan data yaitu dengan pengumpulan informasi mengenai alur informasi, prosedur kerja, data koleksi, kebutuhan informasi, pengembangan basis data sumber informasi dan pelaksanaan layanan pengguna. Mengumpulkan data dengan metode observasi langsung, menganalisis dokumen dan wawancara langsung hingga terkumpul informasi yang dibutuhkan untuk tahap menganalisis data. Observasi dan menganalisis dokumen sebagai studi awal untuk memperoleh data sebagai bahan atau tujuan proses audit informasi. Wawancara dalam penelitian ini untuk menggali informasi lebih dalam tentang layanan repositori institusi, kebutuhan informasi dan kesenjangan informasi. Wawancara dengan informan antara lain dengan kepala perpustakaan dan para pustakawan sebagai staf pengelola layanan repositori institusi yang dilakukan pada 8 Januari 2025. Jumlah informan adalah 14 orang terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan sebagai instruktur pelaksana, 1 orang koordinator pelaksana dan 12 orang pustakawan sebagai pelaksana lapangan pengelola repositori.

Analisis Data

Analisis data dipilih berdasarkan yang paling sesuai dengan permasalahan yang ada, sumber informasi yang jelas tersedia serta data yang terkumpul. Henczel (2001) menyebutkan proses pada tahap menganalisis data menunjukkan informasi yang telah dikumpulkan dalam *database* selama proses penyelidikan terhadap tujuan organisasi tersebut. Laporan dari informasi yang terkumpul dapat dievaluasi dan merumuskan rekomendasi audit informasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi alur informasi dalam pelaksanaan repositori institusi, identifikasi efektivitas prosedur dan instruksi kerja pada layanan repositori institusi, serta identifikasi kebutuhan informasi pada layanan repositori institusi.

Identifikasi alur informasi dalam pelaksanaan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI menunjukkan bahwa prosedur kerja berupa SOP, instruksi kerja dan pembagian tugas sudah dilakukan secara tertulis tentang masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Arus informasi



atau aliran informasi di dalam organisasi merupakan suatu sistem, tersusun dari pola-pola arus informasi yang terjadi pada organisasi, baik ke bawah, ke atas, secara horizontal maupun diagonal (Nurudin, 2016). Kejelasan dalam kebijakan informasi menjadi penting agar alur informasi lebih lancar dan akan memberikan kemudahan bagi staf untuk memahami, sehingga pelaksanaannya lebih lancar. Staf pengelola repositori institusi mendapatkan informasi yang jelas mengenai instruksi dan pembagian kerja baik secara lisan maupun tertulis dari koordinator, sehingga hal ini dapat menghindari miskomunikasi dalam pelaksanaan layanan repositori institusi. Klasifikasi tugas pada layanan repositori institusi terdiri dari tiga, yang pertama yaitu instruktur pelaksana dijabat oleh kepala perpustakaan yang berperan mengawasi dan memberikan bimbingan. Kedua adalah koordinator pelaksana yang bertugas memberikan arahan langsung, mendaftarkan tugas, mengevaluasi hasil kerja, memverifikasi data yang diinput, atau memberi masukan dalam menangani masalah teknis. Koordinator pada layanan repositori institusi Perpustakaan DPR RI dipilih dari salah satu pustakawan yang dianggap memiliki pengalaman dan jabatan pustakawan tertinggi saat ini yaitu pustakawan dengan jabatan Ahli Madya. Berikutnya pelaksana lapangan yaitu para pustakawan di Perpustakaan DPR RI yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan repositori institusi, misalnya sebagai pengumpulan materi, penginputan, abstraksi, inventarisasi, penyebaran informasi dan sejenisnya.

Identifikasi efektivitas prosedur dan instruksi kerja Perpustakaan DPR RI pada layanan repositori institusi Perpustakaan DPR RI menunjukkan bahwa prosedur dan instruksi kerja terkait layanan repositori institusi sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya. SOP, Instruksi kerja dan pembagian tugas sudah dibuat dan dilaksanakan dengan baik, misalnya instruksi untuk pengumpulan dokumen atau terbitan dari satuan kerja sudah dibuat, dibuat jadwal dan sudah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab melalui surat tugas dan instruksi tertulis, misalnya untuk alih media, input data atau verifikasi data. Dengan demikian hal ini akan memudahkan dalam komunikasi dan proses pengambilan keputusan saat ada masalah dalam kegiatan di lapangan.

Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan informasi repositori institusi di Perpustakaan DPR RI membutuhkan informasi terkait kebutuhan pemustaka. Koleksi repositori institusi adalah berupa dokumen atau terbitan dari DPR RI dan Setjen DPR RI. Koleksi repositori institusi dihimpun dari satuan kerja atau anggota DPR RI, dan dokumen atau terbitan yang diperoleh selanjutnya diinput, diolah dan disebarkan kepada pemustaka yaitu anggota DPR RI, ahli, dan pegawai di lingkungan DPR RI serta memberikan layanan terbuka pada masyarakat umum. Penyediaan sumber informasi prioritas dapat disesuaikan dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau program kerja DPR RI, sehingga koleksi repositori institusi menjadi sumber informasi yang andal dan efektif sebagai dukungan fungsi dan tugas DPR RI. Penting mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan informasi pemustaka, salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka misalnya dari data statistik mengenai kecenderungan peminjaman koleksi oleh pemustaka, selain itu berdasarkan kegiatan atau fungsi satuan kerja serta dapat diperoleh melalui survei kebutuhan pengguna. Pengumpulan informasi tentang kebutuhan dokumen atau terbitan DPR RI bertujuan agar koleksi yang tersedia dapat lebih efektif dan andal. Perpustakaan DPR RI juga terus mengembangkan dan melengkapi



berbagai koleksi dokumen atau terbitan DPR RI pada layanan repositori institusi sebagai koleksi khas perpustakaan khusus parlemen yang andal.

Evaluasi Data

Tahap evaluasi dan interpretasi ini untuk mengevaluasi masalah yang ditemukan, membandingkan situasi informasi yang ditemukan saat ini di lapangan dengan situasi informasi yang diharapkan serta memformulasikan rekomendasi atau membuat rencana kerja untuk perubahan. Tahap evaluasi data dan proses interpretasi untuk menentukan arti sebenarnya dari hasil analisis data dalam konteks organisasi tempat audit informasi dilakukan (Henczel, 2001). Dalam audit informasi layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI terdapat temuan-temuan di lapangan, yaitu, pertama, layanan repositori institusi untuk penyebaran informasi secara langsung kepada pemustaka oleh staf belum cukup jelas. Belum adanya instruksi kerja tertulis tentang tugas dan tanggung jawab staf untuk memberdayakan koleksi repositori institusi yang ada melalui penyebaran informasi repositori institusi secara langsung kepada pemustaka sehingga mengurangi efektivitas layanan dalam meningkatkan pemanfaatan dan pemberdayaan koleksi repositori institusi. Temuan masalah di lapangan yang kedua adalah kurangnya sosialisasi layanan repositori institusi kepada anggota DPR RI, ahli atau pegawai sehingga layanan repositori institusi belum diketahui pemustaka, tidak dikenal dan pemanfaatannya sangat kurang. Temuan masalah di lapangan yang ketiga adalah jumlah koleksi repositori institusi masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Pada laman <https://opac.dpr.go.id/> di menu Repositori terlihat hingga Februari 2025 jumlah koleksi dokumen atau terbitan DPR RI yang terdapat pada repositori institusi di Perpustakaan DPR RI baru mencapai 242 judul. Koleksi yang masih terbatas di repositori institusi mengakibatkan pemustaka sering tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan layanan ini belum bisa diandalkan. Temuan masalah di lapangan yang keempat adalah terdapat kendala pada basis data repositori institusi. Laman repositori institusi di Perpustakaan DPR RI masih terkendala masalah teknis sehingga mengganggu proses layanan repositori institusi. Sebelumnya repositori institusi di Perpustakaan DPR RI menggunakan platform *Eprints* yang dikembangkan oleh pihak ketiga dengan dukungan dari bagian IT di DPR RI, namun terdapat banyak kendala teknis salah satunya gangguan akses sehingga diganti ke aplikasi *SLIMS* sekitar Agustus 2024, aplikasi *SLIMS* ini sebelumnya sudah digunakan juga untuk katalog perpustakaan. Dalam perkembangannya basis data yang digunakan masih perlu dilakukan pengembangan sistem sehingga menjadi basis data yang andal dan aman.

Dari empat situasi kesenjangan informasi yang ditemukan saat ini di lapangan maka terdapat beberapa rekomendasi, yaitu pertama, prosedur dan instruksi kerja untuk penyebaran informasi secara langsung kepada pemustaka oleh staf perlu disediakan. Arahan tertulis terkait tugas dan tanggung jawab untuk penyebaran informasi secara langsung kepada pemustaka oleh staf melalui instruksi kerja yang jelas dapat meningkatkan efektivitas layanan, meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar staf pengelola dan memudahkan mengambil keputusan saat di lapangan. Rekomendasi kedua yaitu perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi secara rutin untuk memperkenalkan layanan repositori institusi melalui informasi di situs web, *newsletter*, pamflet, presentasi pada kegiatan institusi, pelatihan teknis atau melalui seminar, sehingga layanan repositori institusi dapat dikenal sebagai layanan yang mudah dimanfaatkan dan dapat



diandalkan untuk membantu tugas dalam pekerjaan. Sosialisasi perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan dan menampilkan berbagai informasi yang dimiliki repositori institusi yang dapat berguna untuk bahan rekomendasi kebijakan dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan luas khususnya tentang parlemen. Rekomendasi ketiga yaitu perlu meningkatkan jumlah koleksi repositori institusi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka dan menjadikan repositori institusi yang andal dengan melakukan identifikasi tujuan atau kebutuhan koleksi repositori institusi. Audit informasi akan memberikan arahan dan pedoman strategis bagi pengelolaan sumber daya informasi organisasi dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan informasi formal (Henczel, 2001). Perlu dilakukan upaya melalui kebijakan penghimpunan koleksi dokumen atau terbitan DPR RI melalui surat edaran atau peraturan yang dibuat oleh pimpinan tertinggi untuk menugaskan satuan kerja menyerahkan dokumen atau terbitan DPR RI kepada perpustakaan. Perlu melakukan kerjasama antara pengelola repositori institusi dengan satuan kerja penghasil dokumen atau terbitan DPR RI, serta kolaborasi dengan penulis atau kontributor. Rekomendasi keempat yaitu perbaikan dan pengembangan basis data repositori institusi yang digunakan. Perlu melakukan identifikasi masalah terkait perangkat lunak, perangkat keras atau faktor manusia. Audit sistem informasi merupakan pengumpulan untuk menilai bukti-bukti dalam menentukan apakah sistem komputer bisa menjaga integritas data dan pengamanan aset sehingga tercapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien (Kurniawan et al., 2018). Jika pengembangan basis data bekerjasama dengan pihak ketiga maka penting untuk dilakukan evaluasi dan seleksi, pilih penyedia yang terpercaya, serta perhatikan kembali kontrak kerjasama dan kesepakatan. Penting untuk selalu melakukan *backup* data dan pemulihan serta perbaikan terkait perangkat lunak atau perangkat keras, melakukan pencegahan masalah melalui pengawasan rutin atau dengan sistem pemantauan dan perlindungan, melakukan evaluasi, pembaruan sistem, dan pelatihan staf supaya mampu mengelola sistem.

Mengkomunikasikan Rekomendasi

Melakukan komunikasi rekomendasi tentang temuan di lapangan dan rekomendasi kepada kepada pihak-pihak terkait. Tahap mengkomunikasikan rekomendasi kepada *stakeholder* bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui laporan tertulis, presentasi secara langsung, seminar dan workshop, *newsletters*, bulletin, atau postingan melalui situs web atau jaringan intranet (Henczel, 2001). Dalam kajian ini, metode yang dilakukan dalam mengkomunikasikan rekomendasi yaitu menyusun laporan tertulis tentang hasil kegiatan audit informasi, presentasi langsung, atau melalui situs web organisasi. Laporan tertulis diserahkan kepada Kepala Biro Protokol dan Humas, Kepala Bidang Perpustakaan, koordinator pelaksana atau salah satu perwakilan staf pengelola layanan repositori institusi, atau pegawai bidang IT sebagai bahan acuan untuk mengambil keputusan dalam pengembangan layanan repositori institusi dan peningkatan kinerja layanan.

Implementasi Rekomendasi

Implementasi rekomendasi yaitu melalui proses atau kegiatan menghubungkan temuan-temuan di lapangan dengan mengimplementasikan rekomendasi atau anjuran untuk mencapai keberhasilan implementasinya. Pada tahap ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan



informasi yang sudah ada di organisasi, misalnya di Perpustakaan DPR RI akan merubah kebijakan pada instruksi kerja layanan repositori institusi. Beberapa rekomendasi yang akan dihubungkan untuk implementasi adalah yang sudah disebutkan pada tahap mengevaluasi data.

Audit Informasi Sebagai Sebuah Keberlanjutan

Proses audit informasi dapat dilakukan dengan rutin dalam rangka menjaga keseimbangan dari perubahan kebutuhan informasi organisasi. Pada kajian ini, Perpustakaan DPR RI dalam layanan repositori institusi akan terus melaksanakan audit informasi secara rutin atau berkala untuk menyeimbangkan kebutuhan informasi para staf perpustakaan maupun pemustaka.

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa permasalahan terkait layanan repositori institusi di Perpustakaan DPR RI, seperti belum optimalnya penyebaran informasi oleh staf, terbatasnya jumlah koleksi, kurangnya sosialisasi kepada pemustaka, serta kendala teknis dalam basis data repositori. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Qomariyah (2019) yang mencatat adanya masalah dalam pemenuhan kebutuhan informasi baik bagi manajemen maupun pengguna, serta terjadinya penyumbatan informasi dari pengguna ke manajemen, yang mencerminkan adanya hambatan komunikasi dan aliran informasi yang serupa dengan yang ditemukan di Perpustakaan DPR RI. Fauziah (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa temuan audit informasi dapat meningkatkan kinerja staf dan membantu menyesuaikan koleksi dengan kebutuhan informasi pengguna. Temuan ini relevan dengan rekomendasi penelitian ini yang mendorong peningkatan koleksi repositori dan sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan layanan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. Sementara itu, Hariyah (2018) mencatat bahwa minimnya sosialisasi hasil-hasil penelitian menghambat distribusi informasi penting. Penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut, di mana kurangnya sosialisasi layanan repositori institusi menyebabkan pemustaka tidak mengetahui potensi layanan yang ada. Dengan demikian, meskipun ada upaya untuk memperbaiki layanan repositori di berbagai institusi, masih terdapat kesamaan dalam tantangan yang dihadapi, seperti terbatasnya koleksi, kurangnya sosialisasi, dan kendala teknis, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam setiap implementasi audit informasi. Namun dalam penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan kebutuhan akan prosedur kerja tertulis dan koordinasi lintas unit dalam konteks lembaga legislatif serta menunjukkan pentingnya kesinambungan audit informasi untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan informasi pemustaka yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi hasil studi sebelumnya, tetapi juga menambahkan perspektif baru dalam penerapan audit informasi sebagai strategi pengembangan layanan di perpustakaan khusus pemerintahan.

KESIMPULAN

Audit informasi pada layanan repositori institusi di perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas, keberlanjutan layanan informasi serta memperkuat posisi perpustakaan dalam organisasi. Audit informasi memberikan momentum untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik manajemen informasi dalam organisasi,



memperjelas kebutuhan pengembangan layanan, mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan informasi dari pandangan pengguna, mendukung upaya pemasaran layanan informasi serta mempererat komunikasi antara pustakawan dan pengguna. Dengan melakukan audit informasi secara berkala, diharapkan perpustakaan dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan informasi organisasi dan pemustaka, sehingga layanan informasi dapat mendukung organisasi secara optimal dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayinde, L., & Omotayo, F. (2019). Information audit as an important tool in organizational management: A review of literature. *Business Information Review*, 36. <https://doi.org/10.1177/0266382119831458>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Pustaka Pelajar.
- Fauziah, K. (2020). Audit Informasi pada Unit Layanan Book Carrier Perpustakaan Bank Pustaka. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan Dan Kearsipan*, 22(2), Article 5.
- Hamim, M. (2019). Membangun Repositori Institusi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sebagai Pusat Deposit dan Pusat Literatur Ilmiah. *Indonesian Journal of Academic Librarianship*, 3(1), 37–49.
- Hariyah. (2018). Information Audit: Langkah Awal Menuju Layanan Prima pada Perpustakaan Badan Lit-bang dan Diklat Kementerian Agama. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 61–70.
- Hashim, H., Ismail, S., & Hussin, N. (2017). Information Audit in Organization: A Library Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i8/3288>
- Henzel, S. (2001). The Information Audit. In *A Practical Guide*. K. G. Saur. <https://doi.org/doi:10.1515/9783110974645>
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2, 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Indonesia. (2019). *Informasi Perpustakaan: Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI*. Perpustakaan DPR RI. <https://opac.dpr.go.id/index.php?p=libinfo>
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt605423ac063ff/peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2021/>
- Indonesia. (2023). *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus*. Dispusip Jakarta. <https://dispusip.jakarta.go.id/storage/regulations/9925c0bb-83d0-4069-8c53-bc9f4af718aa.pdf?version=1700534928>
- Kurniawan, R., Yohanes, A., Wijaya, A., Fernaldy, William, & Andry, J. (2018). Audit Aplikasi Medico Menggunakan Framework COBIT 4.1 Domain ME. *Jurnal Teknoinfo*, 12. <https://doi.org/10.33365/jti.v12i2.69>
- Maharani, L. A. A., Haryanti, N. P. P., & Suhartika, I. P. (2024). Strategi Promosi Perpustakaan Khusus Sebagai Teknik Marketing di Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi; Vol 4 No 1 (2024)*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/d3perpus/article/view/119429>
- Nurudin. (2016). Pengertian Aliran Informasi dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(2), 45–60.
- Qomariyah, A. N. (2019). Audit Informasi pada Sistem Informasi Perpustakaan ITS Surabaya (SPITS): Studi Kasus Bagian Pengolahan dan Layanan di Perpustakaan ITS Surabaya. *Maktabatuna : Jurnal Kajian Kepustakawanan; Vol 1, No 1 (2019)*. <https://doi.org/10.15548/mj.v1i1.976>
- Ridwan, R., & Fajarini, R. (2023). Strategi Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Era Digital: Studi UPT Perpustakaan UIN Mataram. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 15, 151–162. <https://doi.org/10.37108/shaut.v15i2.1172>
- Westrum, R. (2014). The study of information flow: A personal journey. *Safety Science*, 67, 58–63. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.01.009>

